



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO ORGANISASI
SUB UNIT KERJA : BAGIAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WIWIT SETIAWATI**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN REFORMASI BIROKRASI**
3. NHK : **209588**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.537.991.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/21 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 258.843.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 120.780.000
3. Tanah Seluas 250 m2 di WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 343 m2/235 m2 di SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.028.368.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 178.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU SUV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 134.455.600**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 419.468.677**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 2.269.915.277**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.269.915.277

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.